

CREDIT CARDS

IKK
Pir 43/00
Her
P

SKRIPSI

ARRY HERWINDO

**PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
OLEH PIHAK KETIGA**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT OLEH PIHAK KETIGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum

NIP : 131570342



Arry Herwindo

NIM : 039414054

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum antar pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit lahir dari adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tersebut. Adanya kesepakatan dari para pihak atas perjanjian yang disodorkan padanya, atau yang lebih dikenal sebagai perjanjian standar, sudah merupakan penentu bahwa perjanjian tersebut telah sah secara hukum sebagai perikatan seperti yang digariskan dalam 1320 BW. Suatu perikatan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara para pihaknya, dalam hal ini khususnya perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit, merupakan pedoman dalam penggunaan kartu kredit guna pembayaran atas barang dan atau jasa yang telah dinikmati oleh pengguna kartu. Walau perjanjian ini dianggap sebagai alat pemecah masalah yang mungkin timbul selama hubungan hukum berkenaan dengan kartu kredit tersebut berlangsung, masih ada nilai-nilai dalam dunia idealis yang layaknya ada dalam BW, sebagai nilai antara yang menjanjikan kesetaraan dan kesajajaran di antara para pihaknya.
- b. Timbulnya kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit yang lahir dari perjanjian yang disepakati bersama, membawa konsekwensi adanya akibat-akibat hukum

tertentu. Khususnya dalam hal terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga yang beritikad buruk, dimana kewajiban masing-masing pihak tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadapnya, penyelesaian sengketa antara ketiga pihak tersebut harus berpedoman pada sejauh mana para pihak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Dengan didasari hal tersebut, maka dapat disimpulkan pula sebagai pedoman bahwa 'yang salah menanggung kerugian'. Maksudnya adalah bahwa pihak yang telah melakukan kesalahan berupa kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya akan menanggung segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga yang beritikad buruk hal ini ditegakan berdasar suatu pedoman bahwa masing-masing pihak tersebut pada dasarnya berpotensi untuk melalaikan pelaksanaan kewajibannya. Tetapi hal itu semua belum berakhir karena masih ada sebuah perlindungan dari hukum untuk mengalihkan semua kerugian yang telah diderita karena pemenuhan kewajiban yang semestinya tidak dilakukan atas penggunaan kartu kredit secara tidak berhak dengan sarana penuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, tentu saja dengan catatan pihak ketiga tersebut telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan sesuai jalur hukum pidana.

2. Saran

- a. Mengingat hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dengan kartu kredit bergantung pada perjanjian standar yang disodorkan oleh issuer bank dan disepakati bersama, maka seharusnya isi dari perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit dari tiap-tiap issuer bank yang berbeda diseragamkan. Maksudnya adalah agar terdapat suatu standar baku yang diikuti oleh tiap-tiap bank yang menjadi issuer bank. Standar baku isi perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit ini keberadaannya dimaksudkan agar tiap-tiap bank yang menjadi issuer bank akan menyodorkan perjanjian standar yang sesempurna mungkin kepada calon cardholder maupun calon merchantnya. Dengan adanya standar baku ini, maka berarti pula bahwa hubungan hukum antara cardholder maupun merchant dengan issuer bank akan semakin jelas, dengan issuer bank manapun mereka membuat perjanjian.
- b. Perjanjian penerbitan maupun penggunaan kartu kredit yang isinya ditentukan secara sepihak oleh issuer bank, harus dibuat sejelas dan selengkap mungkin. Kelengkapan dan kejelasan ini adalah dalam isi dari perjanjian tersebut yang berupa pasal-pasal, yang menentukan hubungan hukum antara pihak-pihaknya. Harus disebutkan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekwensi atau akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal tersebut tentunya termasuk



pula akibat hukum yang timbul apabila suatu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu atau lebih pihak. Hal tersebut tidak cukup ada dalam perjanjian secara implisit, namun harus secara eksplisit disebutkan secara jelas dalam pasal-pasal perjanjian. Dengan demikian maka apabila terjadi kerugian pada salah satu atau lebih pihak akibat kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya, maka suatu sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan dengan mudah.

